

Analisis Karakteristik Ekonomi Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022

Analysis of Economic Characteristics of Villages in the Mainland Region of Riau Province According to the Village Development Index (IDM) in 2022

Novriza Awwalin Nisa, Ahmad Rifai*, Deby Kurnia

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

*Email: ahmad.rifai@lecturer.unri.ac.id

(Diterima 10-07-2024; Disetujui 27-07-2024)

ABSTRAK

Pembangunan desa menurut indeks desa membangun (IDM) tahun 2022 di provinsi Riau mengalami perubahan pada desa maju dan mandiri yang semakin bertambah, sedangkan desa sangat tertinggal dan tertinggal semakin berkurang. Namun, peringkat IDM provinsi Riau masih berada pada status berkembang dengan nilai 0.7012. Nilai IKS sebesar 0.7861, nilai IKE sebesar 0.5979 dan nilai IKL sebesar 0.7195. Dari ketiga indeks komposit tersebut, indeks ketahanan ekonomi (IKE) yang memiliki nilai terendah dibandingkan nilai indeks ketahanan sosial (IKS) dan indeks ketahanan lingkungan (IKL). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik ekonomi desa berdasarkan tingkat status perkembangan desa menurut IDM tahun 2022 di wilayah daratan provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis *kruskal-wallis*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap karakteristik ekonomi desa pada seluruh tingkat status perkembangan desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022, dilihat dari nilai *Asymp. Sig.* atau nilai *p value* adalah 0.000 dimana < 0.05 . Produk unggulan desa di desa berkembang lebih beragam dibandingkan dengan status desa lainnya yaitu rata-rata berupa komoditi padi dan kelapa sawit. Industri mikro dan kecil di desa mandiri lebih banyak dibandingkan dengan status desa lainnya yaitu rata-rata 70 industri yang terdiri atas industri rumah tangga, pariwisata, perikanan, pertanian, peternakan, dan industri lainnya. Ketersediaan pertokoan di desa mandiri lebih banyak dibandingkan dengan status desa lainnya yaitu rata-rata 111 pertokoan. Akses pasar di desa mandiri lebih layak dan kondusif dibandingkan dengan status desa lainnya yaitu rata-rata berupa pasar dengan bangunan permanen. Akses lembaga keuangan/perbankan di desa mandiri lebih beragam dibandingkan status desa lainnya yaitu rata-rata berupa BUMDes dan bank pemerintah. Status BUMDes di desa mandiri rata-rata sudah aktif dibandingkan dengan status desa lainnya. Omset BUMDes di desa mandiri lebih besar dibandingkan dengan status desa lainnya yaitu rata-rata sebesar 478.011.655 rupiah. Bidang usaha BUMDes di desa mandiri lebih banyak dibandingkan dengan status desa lainnya yaitu rata-rata 6 bidang yang terdiri atas bidang jasa, simpan pinjam, pertanian, BRILink, sembako dan kelompok usaha. Pendapatan asli desa di desa mandiri lebih banyak dibandingkan dengan status desa lainnya yaitu rata-rata sebesar 108.456.305 rupiah. Dana desa di desa maju lebih banyak dibandingkan dengan status desa lainnya yaitu rata-rata sebesar 3.643.684.268 rupiah.

Kata kunci: Pembangunan Desa, Karakteristik Ekonomi, Indeks Desa Membangun, Provinsi Riau

ABSTRACT

*Village development according to the village development index (IDM) in 2022 in Riau province experienced changes in developed and independent villages which increased while very underdeveloped and underdeveloped villages decreased. However, Riau province's IDM ranking is still in developing status with a value of 0.7012. The IKS value is 0.7861, the IKE value is 0.5979 and the IKL value is 0.7195. Of the three composite indices, the economic resilience index (IKE) has the lowest value compared to the social resilience index (IKS) and environmental resilience index (IKL). This study aims to identify and analyze the economic characteristics of villages based on the level of village development status according to IDM in 2022 in the mainland area of Riau province. This research uses quantitative descriptive method with *kruskal-wallis* analysis. The results showed that there were significant differences in village economic characteristics at all levels of village development status according to the Village Development Index (IDM) in 2022, seen from the *Asymp. Sig.* or *p value* is 0.000 which is < 0.05 . Village superior products in developing villages are more diverse compared to other village statuses, with an average of rice and palm oil commodities. Micro and small industries in independent villages are more numerous compared to other village statuses, with an*

average of 70 industries consisting of household industries, tourism, fisheries, agriculture, livestock and other industries. The availability of shops in independent villages is more than in other village statuses, with an average of 111 shops. Market access in independent villages is more feasible and conducive than in other village statuses, with an average market with permanent buildings. Access to financial/banking institutions in independent villages is more diverse compared to other village statuses, with an average of BUMDes and government banks. The status of BUMDes in independent villages is, on average, active compared to other village statuses. The turnover of BUMDes in independent villages is larger compared to other village statuses, with an average of IDR 478,011,655. BUMDes business sectors in independent villages are more numerous compared to other village statuses, with an average of 6 sectors consisting of services, savings and loans, agriculture, BRILink, groceries and business groups. Village own-source revenues in independent villages are higher compared to other village statuses, with an average of IDR 108,456,305. Village funds in developed villages are more than other village statuses, with an average of 3,643,684,268 rupiah.

Keywords: Village Development, Economic Characteristics, Village Development Index, Riau Province

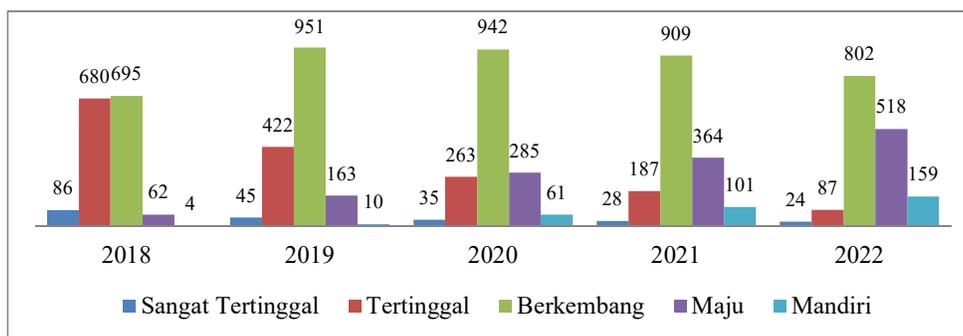
PENDAHULUAN

Desa merupakan otoritas terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak UU Nomor 6 tahun 2014 pembangunan desa sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pembangunan desa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan desa pada taraf sosial, ekonomi dan lingkungan (Alimah, 2018). Untuk dapat merealisasikan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan No. 60 Tahun 2014 terkait dana desa.

Permendes No. 2 tahun 2016 menyatakan pembangunan desa di Indonesia dapat dilihat dan diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks desa membangun merupakan sebuah indeks komposit yang mampu memotret perkembangan kemandirian desa yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Indeks desa membangun membagi lima kategori status desa yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

Provinsi Riau dalam melaksanakan pembangunan desa menuju desa mandiri memperoleh dana desa sebesar Rp1.400.296.630.000 (Kemenkeu, 2022). Efektifitas penggunaan dana desa dapat dilihat melalui perkembangan status desa, dimana jumlah desa maju dan mandiri semakin bertambah, sedangkan jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal semakin berkurang. Adapun status perkembangan desa di Provinsi Riau Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Status IDM Provinsi Riau Tahun 2018-2022

Pembangunan desa dari tahun 2018-2022 mengalami perubahan yang positif. Desa mandiri pada tahun 2018 berjumlah 4 desa, tahun 2019 berjumlah 10 desa, tahun 2020 berjumlah 61 desa, tahun 2021 berjumlah 101 desa, hingga tahun 2022 bertambah menjadi 159 desa. Desa maju pada tahun 2018 berjumlah 62 desa, tahun 2019 berjumlah 163 desa, tahun 2020 berjumlah 285 desa, tahun 2021 berjumlah 364 desa, hingga tahun 2022 bertambah menjadi 518 desa. Desa berkembang pada tahun 2018 berjumlah 695 desa, tahun 2019 berjumlah 951 desa, tahun 2020 berjumlah 942 desa,

tahun 2021 berjumlah 909 desa, hingga tahun 2022 menjadi 802. Desa tertinggal tahun 2018 berjumlah 680 desa, tahun 2019 berjumlah 422 desa, tahun 2020 berjumlah 263 desa, tahun 2021 berjumlah 187 desa, hingga tahun 2022 berkurang menjadi 87 desa. Desa sangat tertinggal pada tahun 2018 berjumlah 86 desa, tahun 2019 berjumlah 45 desa, tahun 2020 berjumlah 35 desa, tahun 2021 berjumlah 28 desa, hingga tahun 2022 berkurang menjadi 24 desa. Namun, pada tahun 2022 peringkat IDM provinsi Riau masih berada di status berkembang dengan nilai 0.7012. Nilai IKS sebesar 0.7861, nilai IKE sebesar 0.5979 dan nilai IKL sebesar 0.7195 (Kemendes, 2022). Dari ketiga indeks komposit tersebut, indeks ketahanan ekonomi (IKE) memiliki nilai yang paling rendah dibandingkan dengan nilai indeks ketahanan sosial (IKS) dan indeks ketahanan lingkungan (IKL) Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan karakteristik ekonomi desa berdasarkan tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di wilayah daratan Provinsi Riau, dengan pertimbangan dan kriteria bahwa wilayah tersebut memiliki potensi keragaman produksi, akses perdagangan yang memadai ditandai dengan adanya fasilitas pertokoan dan pasar, serta ketersediaan lembaga keuangan/perbankan di desa. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei-September 2023.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun data yang digunakan adalah publikasi Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 pada data Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dengan memilih indikator berdasarkan dimensi ekonomi. Indikator yang digunakan pada penelitian adalah produk unggulan desa, industri mikro dan kecil, ketersediaan pertokoan, akses pasar, akses lembaga keuangan/perbankan, status BUMDes, omset BUMDes, bidang usaha BUMDes, pendapatan asli desa, dan dana desa.

Penelitian ini menggunakan analisis non parametrik dengan uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis pada penelitian digunakan untuk menganalisis perbedaan karakteristik ekonomi desa berdasarkan tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis Kruskal-Wallis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang digunakan sebagai indikator ekonomi desa wilayah daratan Provinsi Riau yang diperoleh dari publikasi IDM Kementerian Desa tahun 2022. Adapun data yang digunakan adalah data produk unggulan desa, industri mikro dan kecil, ketersediaan pertokoan, akses pasar, akses lembaga keuangan/perbankan, status BUMDes, omset BUMDes, jumlah bidang usaha BUMDes, pendapatan asli desa, dan dana desa.
2. Melakukan tabulasi dan transformasi data terhadap indikator yang menjadi kategorial, seperti produk unggulan desa, akses pasar, akses lembaga keuangan/perbankan, dan status BUMDes.
3. Menginput seluruh data untuk dilakukan uji kenormalan data, sebelum melakukan analisis diskriminan.
4. Melakukan uji kenormalan data menggunakan *one sample kolmogorov smirnov*. Namun data tidak berdistribusi normal, sehingga analisis diskriminan tidak dapat dilakukan. Maka dilakukan analisis non parametrik yaitu uji Kruskal-Wallis. Adapun rumus Kruskal-Wallis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k n_i (R_i - R)^2 \quad \text{atau} \quad H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k \frac{R_i^2}{n_i} - 3(N+1)$$

Keterangan:

H = Nilai Kruskal-Wallis hasil penghitungan

N = jumlah sampel

K = Banyaknya Sampel

R_i = jumlah peringkat pada kelompok i

n_i = jumlah sampel pada kelompok i

Uji Kruskal Wallis memiliki hipotesis sebagai berikut:

H₀ : tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi desa dengan tingkat status perkembangan desa

H_1 : ada perbedaan karakteristik ekonomi desa dengan tingkat status perkembangan desa

Jika p-value < daerah kritis maka keputusan hipotesis adalah menolak H_0 dan menerima H_1 atau yang berarti ada perbedaan karakteristik ekonomi desa, jika p-value > daerah kritis maka keputusan hipotesis adalah menerima H_0 dan menolak H_1 atau yang berarti tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi desa. Batas kritis adalah 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah perairan, dengan luas area sebesar 89.935 km². Letak geografis Provinsi Riau antara 01° 05' 00" Lintang Selatan dan 02° 25' 00" Lintang Utara, atau antara 100° 00' 00" dan 105° 05' 00" Bujur Timur. Membentang dari kaki Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Selain itu, terdapat wilayah lautan sejauh 12 mil dari pinggir pantai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Wilayah daratan Provinsi Riau terdiri atas Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kuantan Singingi.

Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 11.289,28 km² yang terdiri atas 21 kecamatan dan 242 desa/kelurahan. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki luas wilayah 8,195.26 km² yang terdiri atas 14 kecamatan dan 178 desa/kelurahan. Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah 13.925 km² yang terdiri atas 12 kecamatan dan 104 desa/kelurahan. Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.588,13 km² yang terdiri atas 16 kecamatan dan 139 desa/kelurahan. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7.656 km² yang terdiri atas 15 kecamatan dan 218 desa/kelurahan.

Karakteristik Ekonomi Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Tahun 2022

Identifikasi karakteristik ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi pada keseluruhan data yang dianalisis yaitu terdiri atas poduk unggulan, industri mikro dan kecil, jumlah pertokoan, akses pasar, akses lembaga perbankan/keuangan, status BUMDes, omset BUMDes, bidang usaha BUMDes, pendapatan asli desa, dan dana desa.

1. Perbedaan Rata-rata Produk Unggulan Desa

Produk unggulan desa adalah kemampuan desa dalam memanfaatkan sumber daya alamnya untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai, sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi desa dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa, produk unggulan ini dapat mendorong terwujudnya kemandirian perekonomian desa (Soleh, 2017).

Tabel 1. Produk Unggulan Desa Berdasarkan Tingkat Status Perkembangan Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Tahun 2022

Status Perkembangan Desa	Jumlah Desa	Produk Unggulan	Rata-rata
Desa Sangat Tertinggal	23	4	1
Desa Tertinggal	25	6	1
Desa Berkembang	432	5, 6	2
Desa Maju	318	6	1
Desa Mandiri	81	6	1
Kruskal-Wallis			45.362
Df			4
Asymp. Sig.			.000

Sumber: idm.kemendes.go.id, 2022 (diolah)

Keterangan: 1. Jagung, 2. Kelapa, 3. Lainnya, 4. Karet, 5. Padi, 6. Kelapa Sawit

Semakin tinggi tingkat status perkembangan desa, maka produk unggulan yang ada di desa semakin beragam. Produk unggulan di wilayah daratan Provinsi Riau terdiri atas komoditi jagung, komoditi kelapa, komoditi lainnya, komoditi karet, komoditi padi dan komoditi kelapa sawit. Dengan memanfaatkan potensi desa dan mengembangkan sumber daya manusianya, maka pemerintah desa dan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dapat bersinergi untuk mencapai kemandirian ekonomi desa (Margayaningsih, 2015). Komoditi unggulan desa merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi dan peranan penting dalam pembangunan. Peran komoditi unggulan dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyedia bahan baku, pendorong agroindustri, peluang lapangan pekerjaan bahkan penyumbang devisa melalui hasil ekspor. Oleh karena itu, melalui komoditi unggulan desa yang kaya dan beragam dapat mendorong kemajuan dan kemandirian ekonomi desa.

Berdasarkan Tabel 1, sebanyak 23 desa sangat tertinggal rata-rata memiliki 1 jenis produk unggulan yaitu komoditi karet. Pada desa tertinggal yang berjumlah 25 desa, rata-rata memiliki 1 jenis produk unggulan yaitu komoditi kelapa sawit. Desa berkembang yang berjumlah 432 desa rata-rata memiliki 2 jenis produk unggulan yaitu komoditi padi dan kelapa sawit. Sebanyak 318 desa maju rata-rata memiliki 1 jenis produk unggulan yaitu komoditi kelapa sawit. Sebanyak 81 desa mandiri rata-rata memiliki 1 jenis produk unggulan yaitu komoditi kelapa sawit.

Secara statistik, berdasarkan uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap produk unggulan desa pada setiap tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022. Desa berkembang memiliki produk unggulan lebih beragam dibandingkan status desa lainnya, yaitu rata-rata sebanyak 2 produk berupa padi dan kelapa sawit. Nilai Kruskal-Wallis produk unggulan desa adalah 45.362, nilai *df* (*degree of freedom*) produk unggulan desa adalah 4 dan nilai *Asymp. Sig.* Atau nilai *p value* produk unggulan desa adalah 0.000. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap produk unggulan desa pada setiap tingkat status perkembangan desa.

2. Perbedaan Rata-rata Industri Mikro dan Kecil

Usaha industri mikro di daerah pedesaan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi lokal, serta membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Industri skala kecil yang dijalankan di pedesaan oleh perorangan atau kelompok disebut usaha industri mikro pedesaan (Halim, 2020).

Tabel 2. Industri Mikro dan Kecil Berdasarkan Tingkat Status Perkembangan Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Tahun 2022

Status Perkembangan Desa	Jumlah Desa	Industri Mikro dan Kecil	Rata-rata
Desa Sangat Tertinggal	23	0	0
Desa Tertinggal	25	62	2
Desa Berkembang		5.759	13
Desa Maju	319	15.665	49
Desa Mandiri	81	5.685	70
Kruskal-Wallis			165.042
Df			4
Asymp. Sig.			.000

Sumber: idm.kemendesa.go.id, 2022 (diolah)

Semakin tinggi tingkat status perkembangan desa, maka industri mikro dan kecil yang ada di desa semakin banyak. Sektor industri merupakan salah satu usaha yang dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi melalui sektor industrialisasi karena mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dengan sebaik-baiknya (Elfaki *et al.* 2021).

Berdasarkan Tabel 2, pada desa sangat tertinggal yang berjumlah 23 desa, rata-rata masih belum memiliki industri mikro dan kecil atau 0 industri di desa. Desa sangat tertinggal yang berjumlah 25 desa rata-rata memiliki 2 industri di desa yang terdiri atas industri rumah tangga dan industri lainnya. Desa berkembang yang berjumlah 433 desa rata-rata memiliki 13 industri di desa. Desa maju yang berjumlah 319 desa rata-rata memiliki 49 industri di desa. Pada desa mandiri yang berjumlah 81 desa rata-rata memiliki 70 industri. Industri mikro dan kecil yang terdapat di desa berkembang, maju dan mandiri rata-rata industri rumah tangga, pariwisata, perikanan, perkebunan, peternakan dan industri lainnya.

Secara statistik berdasarkan uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap industri mikro dan kecil pada setiap tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022. Desa mandiri memiliki industri mikro dan kecil lebih banyak dibandingkan status desa lainnya, yaitu rata-rata sebanyak 70 industri. Nilai Kruskal-Wallis industri mikro dan kecil adalah 165.042, nilai *df* (*degree of freedom*) industri mikro dan kecil adalah 4 dan nilai *Asymp. Sig.* Atau nilai *p value* industri mikro dan kecil adalah 0.000. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap industri mikro dan kecil pada setiap tingkat status perkembangan desa.

3. Perbedaan Rata-rata Ketersediaan Pertokoan

Undang-undang perdagangan No. 7 tahun 2014 menjelaskan toko merupakan usaha dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*,

supermarket, departement store, hypermarket ataupun toko grosir. Area pertokoan terdiri atas satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan usaha.

Tabel 3. Ketersediaan Pertokoan Berdasarkan Tingkat Status Perkembangan Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Tahun 2022

Status Perkembangan Desa	Jumlah Desa	Ketersediaan Pertokoan	Rata-rata
Desa Sangat Tertinggal	23	22	1
Desa Tertinggal	25	221	9
Desa Berkembang	432	8.667	20
Desa Maju	317	10.831	34
Desa Mandiri	81	8.987	111
Kruskal-Wallis			120.370
Df			4
Asymp. Sig.			.000

Sumber: idm.kemendesa.go.id, 2022 (diolah)

Semakin tinggi tingkat status perkembangan desa, maka ketersediaan pertokoan yang ada di desa semakin banyak. Kehadiran toko di desa memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di desa, karena dengan adanya pertokoan maka akan terjadinya perputaran uang di masyarakat (Muharam, 2022). Dengan banyaknya ketersediaan pertokoan di desa, maka akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian baik itu sandang, pangan, dan papan.

Berdasarkan Tabel 3, pada desa sangat tertinggal yang berjumlah 23 desa rata-rata memiliki 1 pertokoan di desa. Pada desa tertinggal yang berjumlah 25 desa rata-rata memiliki 9 pertokoan di desa. Pada desa berkembang yang berjumlah 432 desa rata-rata memiliki 20 pertokoan di desa. Desa maju yang berjumlah 317 desa rata-rata memiliki 34 pertokoan di desa. Pada desa mandiri yang berjumlah 81 desa rata-rata memiliki 111 pertokoan di desa.

Secara statistik, berdasarkan uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ketersediaan pertokoan pada setiap tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022. Desa mandiri memiliki ketersediaan pertokoan lebih banyak dibandingkan status desa lainnya, yaitu rata-rata sebanyak 111 pertokoan. Nilai Kruskal-Wallis ketersediaan pertokoan adalah 120.370, nilai df (*degree of freedom*) ketersediaan pertokoan adalah 4 dan nilai *Asymp. Sig.* Atau nilai *p value* ketersediaan pertokoan adalah 0.000. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ketersediaan pertokoan pada setiap tingkat status perkembangan desa.

4. Perbedaan Rata-rata Akses Pasar

Pasar berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal dan juga perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pasar rakyat adalah pasar yang didirikan oleh pemerintah daerah yang memiliki tempat usaha seperti toko, kios, dan tenda yang dikelola oleh pedagang skala kecil hingga menengah dengan menerapkan sistem jual beli bahkan tawar-menawar (Kalsum, 2019). Pasar rakyat memiliki potensi dalam menggerakkan perekonomian karena adanya aktivitas perdagangan dan perannya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang sesuai.

Tabel 4. Akses Pasar Berdasarkan Tingkat Status Perkembangan Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Tahun 2022

Status Perkembangan Desa	Jumlah Desa	Akses Pasar	Rata-rata
Desa Sangat Tertinggal	23	1	1
Desa Tertinggal	25	1, 3	2
Desa Berkembang	432	1, 4	2
Desa Maju	317	1, 4	2
Desa Mandiri	81	4	1
Kruskal-Wallis			71.748
Df			4
Asymp. Sig.			.000

Sumber: idm.kemendesa.go.id, 2022 (diolah)

Keterangan: 1. Tidak ada pasar, 2. Ada aktivitas pasar tanpa bangunan, 3. Pasar semi permanen, 4. Pasar permanen

Semakin tinggi tingkat status perkembangan desa, maka pasar yang ada di desa memiliki bangunan yang lebih layak dan kondusif. Akses pasar di wilayah daratan Provinsi Riau yaitu, terdapat desa yang tidak memiliki pasar, terdapat aktivitas pasar namun tidak memiliki bangunan, terdapat aktivitas pasar dengan bangunan semi permanen dan terdapat aktivitas pasar dengan bangunan permanen. Pertumbuhan pasar rakyat sangat penting bagi sistem perdagangan nasional karena pasar rakyat berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Pengembangan pasar dapat meningkatkan pendapatan pedagang dan memperkuat peran pasar sebagai penyangga ketersediaan kebutuhan masyarakat (Kementerian perdagangan, 2017). Ketersediaan pasar yang layak dan kondusif dapat mendorong konsumen untuk tetap berbelanja di pasar-pasar karena lebih bagus, lebih bersih dan tidak becek jika hujan sehingga aktivitas pasar dapat terus berputar (Ariestiyanti, 2020).

Berdasarkan Tabel 4, sebanyak 23 desa sangat tertinggal rata-rata memiliki 1 jenis pasar yaitu tidak terdapat pasar di desa. Pada desa tertinggal yang berjumlah 25 desa rata-rata memiliki 2 jenis pasar yaitu tidak memiliki pasar di desa dan terdapat pasar semi permanen. Desa berkembang yang berjumlah 432 desa dan desa maju yang berjumlah 317 desa rata-rata memiliki 2 jenis pasar yaitu tidak memiliki pasar di desa dan terdapat pasar permanen. Pada desa mandiri yang berjumlah 81 desa rata-rata memiliki 1 jenis pasar yaitu pasar permanen.

Secara statistik, berdasarkan uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap akses pasar pada setiap tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022. Desa mandiri memiliki akses pasar dengan bangunan lebih layak dan kondusif dibandingkan status desa lainnya, yaitu rata-rata memiliki 1 jenis pasar berupa pasar permanen. Nilai Kruskal-Wallis akses pasar adalah 71.748, nilai *df* (*degree of freedom*) akses pasar adalah 4 dan nilai *Asymp. Sig.* Atau nilai *p value* akses pasar adalah 0.000. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap akses pasar pada setiap tingkat status perkembangan desa.

5. Perbedaan Rata-rata Akses Lembaga Keuangan/Perbankan

Lembaga keuangan adalah organisasi yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka lembaga keuangan merupakan tempat di mana uang ditransformasikan atau dipindahkan dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang mempunyai kekurangan dana (Ghozali, 2018).

Tabel 5. Akses Lembaga Keuangan/Perbankan Berdasarkan Tingkat Status Perkembangan Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Tahun 2022

Status Perkembangan Desa	Jumlah Desa	Akses Lembaga Keuangan/Perbankan	Rata-rata
Desa Sangat Tertinggal	23	2	1
Desa Tertinggal	25	2	1
Desa Berkembang	432	2	1
Desa Maju	317	2	1
Desa Mandiri	81	2, 5	2
Kruskal-Wallis			149.034
Df			4
Asymp. Sig.			.000

Sumber: idm.kemendesa.go.id, 2022 (diolah)

Keterangan: 1. Tidak ada lembaga, 2. BUMDes, 3. BPR, 4. Bank swasta. 5. Bank pemerintah

Semakin tinggi tingkat status perkembangan desa, maka akses lembaga keuangan/perbankan yang ada di desa lebih beragam. Akses lembaga keuangan/perbankan yang ada di wilayah daratan Provinsi Riau yaitu, terdapat desa yang tidak memiliki lembaga keuangan/perbankan, terdapat lembaga keuangan/perbankan berupa BUMDes, terdapat lembaga keuangan berupa BPR, terdapat lembaga keuangan/perbankan berupa bank swasta, dan terdapat lembaga keuangan/perbankan berupa bank pemerintah. Fungsi dan peranan utama lembaga keuangan/perbankan adalah sebagai penyedia modal usaha. Bagi masyarakat lembaga keuangan/perbankan berperan penting dalam memberikan bantuan modal usaha dan biaya-biaya lainnya. Dengan beragamnya lembaga keuangan/perbankan tersebut, masyarakat tentu lebih mudah dan terbantu dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya (Muharam, 2022).

Berdasarkan Tabel 5, sebanyak 23 desa sangat tertinggal, 25 desa tertinggal, 432 desa berkembang dan 317 desa maju rata-rata memiliki 1 jenis lembaga keuangan/perbankan yaitu lembaga BUMDes. Pada desa mandiri yang berjumlah 81 desa rata-rata memiliki 2 jenis lembaga keuangan/perbankan yaitu lembaga BUMDes dan bank pemerintah.

Secara statistik, berdasarkan uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap akses lembaga keuangan/perbankan pada setiap tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022. Desa mandiri memiliki akses lembaga keuangan/perbankan lebih beragam dibandingkan status desa lainnya, yaitu rata-rata memiliki 2 jenis lembaga keuangan/perbankan berupa BUMDes dan bank pemerintah. Nilai Kruskal-Wallis akses lembaga keuangan/perbankan adalah 149.034, nilai *df* (*degree of freedom*) akses lembaga keuangan/perbankan adalah 4 dan nilai *Asymp. Sig.* Atau nilai *p value* akses lembaga keuangan/perbankan adalah 0.000. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap akses lembaga keuangan/perbankan pada setiap tingkat perkembangan desa.

6. Perbedaan Rata-rata Status BUMDes

UU No 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya. Sehingga dapat dikatakan BUMDes adalah upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui usaha desa yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (Savitri *et al.*, 2019).

Tabel 6. Status BUMDes Berdasarkan Tingkat Status Perkembangan Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Tahun 2022

Status Perkembangan Desa	Jumlah Desa	Status BUMDes	Rata-rata
Desa Sangat Tertinggal	23	1	1
Desa Tertinggal	25	2	1
Desa Berkembang	432	2	1
Desa Maju	317	2	1
Desa Mandiri	81	2	1
Kruskal-Wallis			178.646
Df			4
Asymp. Sig.			.000

Sumber: idm.kemendesa.go.id, 2022 (diolah)

Keterangan: 1. Tidak aktif, 2. Aktif

Semakin tinggi tingkat status perkembangan desa, maka status BUMDes yang ada di desa semakin aktif. Status BUMDes yang ada di wilayah daratan Provinsi Riau terbagi menjadi dua yaitu BUMDes tidak aktif dan BUMDes aktif. Banyaknya BUMDes aktif di desa merupakan salah satu simbol dari upaya untuk mewujudkan ekonomi desa yang mandiri (Wahid dkk, 2020). Aktifnya sebuah BUMDes dalam mengelola dan memanfaatkan potensi di desa tentunya dapat mendorong kemajuan desa itu sendiri (Prihatin *et al.*, 2018).

Berdasarkan Tabel 6, setiap tingkat status desa masing-masing memiliki 1 status BUMDes. Pada desa sangat tertinggal yang berjumlah 23 desa rata-rata memiliki BUMDes berstatus tidak aktif. Pada desa tertinggal yang berjumlah 25 desa, desa berkembang berjumlah 432 desa, desa maju berjumlah 317 desa dan desa mandiri berjumlah 81 desa, masing-masing desa rata-rata memiliki BUMDes berstatus aktif.

Secara statistik, berdasarkan uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap status BUMDes pada setiap tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022. Desa mandiri memiliki status BUMDes aktif dibandingkan status desa lainnya. Nilai Kruskal-Wallis status BUMDes adalah 178.646, nilai *df* (*degree of freedom*) status BUMDes adalah 4 dan nilai *Asymp. Sig.* Atau nilai *p value* status BUMDes adalah 0.000. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap status BUMDes pada setiap tingkat status perkembangan desa.

7. Perbedaan Rata-rata Omset BUMDes

Menjalankan kewirausahaan desa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sekaligus sebagai strategi dalam perkembangan kesejahteraan (Ansari, 2016). BUMDes merupakan wadah untuk menjalankan kewirausahaan desa yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat melalui pengelolaan aset, jasa pelayanan dan berbagai macam

usaha. Dengan menghasilkan omset yang banyak melalui berbagai bidang kewirausahaan, maka membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

Tabel 7. Omset BUMDes Berdasarkan Tingkat Status Perkembangan Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Tahun 2022

Status Perkembangan Desa	Jumlah Desa	Omset BUMDes	Rata-rata
Desa Sangat Tertinggal	23	30.640.000	1.332.174
Desa Tertinggal	25	662.143.939	26.485.758
Desa Berkembang	432	83.806.161.943	193.995.745
Desa Maju	317	66.587.470.150	210.055.111
Desa Mandiri	81	38.718.944.071	478.011.655
Kruskal-Wallis			74.545
Df			4
Asymp. Sig.			.000

Sumber: idm.kemendesa.go.id, 2022 (diolah)

Semakin tinggi tingkat status perkembangan desa, maka omset BUMDes yang ada di desa semakin banyak. BUMDes merupakan salah satu strategi dalam hal meningkatkan pendapatan asli desa guna memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes yang dapat mengelola potensi desa dengan baik akan berdampak kepada peningkatan omset BUMDes. Selain itu, majunya BUMDes tidak terlepas dari kinerja anggota-anggota yang terlibat dalam manajemen BUMDes (Jaryono, 2019).

Berdasarkan Tabel 7, desa sangat tertinggal yang berjumlah 23 desa rata-rata memiliki omset BUMDes sebesar 1.332.174 rupiah. Pada desa tertinggal yang berjumlah 25 desa rata-rata memiliki omset BUMDes sebesar 26.485.758 rupiah. Pada desa berkembang yang berjumlah 432 desa rata-rata memiliki omset BUMDes sebesar 193.995.745 rupiah. Desa maju yang berjumlah 317 desa rata-rata memiliki omset BUMDes sebesar 210.055.111 rupiah. Pada desa mandiri yang berjumlah 81 desa rata-rata memiliki omset BUMDes sebesar 478.011.655 rupiah.

Secara statistik, berdasarkan uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap omset BUMDes pada setiap tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022. Desa mandiri memiliki omset BUMDes lebih besar dibandingkan status desa lainnya, yaitu rata-rata sebesar 478.011.655 rupiah. Nilai Kruskal-Wallis omset BUMDes adalah 74.545, nilai *df* (*degree of freedom*) omset BUMDes adalah 4 dan nilai *Asymp. Sig.* Atau nilai *p value* omset BUMDes adalah 0.000. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap omset BUMDes pada setiap tingkat status perkembangan desa.

8. Perbedaan Rata-rata Jumlah Bidang Usaha BUMDes

BUMDes adalah sebuah lembaga ekonomi desa yang didirikan oleh pemerintah desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan sesuai dengan potensi desa (Ramadana *et al*, 2014). Pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) dianggap sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi desa melalui berbagai bidang usaha desa. Pembentukan bidang usaha BUMDes ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa, baik itu bisnis sosial, keuangan, penyewaan, perdagangan, usaha bersama dan usaha lainnya.

Tabel 8. Jumlah Bidang Usaha BUMDes Berdasarkan Tingkat Status Perkembangan Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Tahun 2022

Status Perkembangan Desa	Jumlah Desa	Jumlah Bidang Usaha BUMDes	Rata-rata
Desa Sangat Tertinggal	23	2	0
Desa Tertinggal	25	31	1
Desa Berkembang	433	1.171	3
Desa Maju	319	1.168	4
Desa Mandiri	81	478	6
Kruskal-Wallis			131.452
Df			4
Asymp. Sig.			.000

Sumber: idm.kemendesa.go.id, 2022 (diolah)

Semakin tinggi tingkat status perkembangan desa, maka jumlah bidang usaha BUMDes yang ada di desa semakin banyak. Salah satu sentra utama dalam meningkatkan kemajuan pembangunan pedesaan adalah dengan meningkatkan ekonomi di pedesaan. Adanya pembentukan BUMDes diharapkan mampu mendorong perekonomian di desa serta dapat melakukan pemerataan ekonomi dengan terciptanya beberapa bidang usaha yang dimiliki BUMDesa (Kasila, 2018).

Berdasarkan Tabel 8, pada desa sangat tertinggal yang berjumlah 23 desa, rata-rata masih belum memiliki bidang usaha BUMDes atau 0 bidang usaha. Pada desa tertinggal yang berjumlah 25 desa rata-rata memiliki 1 bidang usaha BUMDes yaitu bidang pertanian. Desa berkembang yang berjumlah 433 desa rata-rata memiliki 3 bidang usaha BUMDes yaitu bidang simpan pinjam, pertanian, dan sembako. Pada desa maju yang berjumlah 319 desa rata-rata memiliki 4 bidang usaha BUMDes yaitu bidang simpan pinjam, BRIlink, jasa, dan sembako. Pada desa mandiri yang berjumlah 81 desa rata-rata memiliki 6 bidang usaha BUMDes yaitu bidang jasa, simpan pinjam, pertanian, BRIlink, sembako, dan kelompok usaha.

Secara statistik, berdasarkan uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap bidang usaha BUMDes pada setiap tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022. Desa mandiri memiliki bidang usaha BUMDes lebih banyak dibandingkan status desa lainnya, yaitu rata-rata sebanyak 6 bidang. Nilai Kruskal-Wallis bidang usaha BUMDes adalah 131.452, nilai *df* (*degree of freedom*) bidang usaha BUMDes adalah 4 dan nilai *Asymp. Sig.* Atau nilai *p value* bidang usaha BUMDes adalah 0.000. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap bidang usaha BUMDes pada setiap tingkat status perkembangan desa.

9. Perbedaan Rata-rata Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa (PADes) merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, pendapatan asli desa yaitu berupa hasil usaha desa yang diantaranya adalah hasil pengelolaan BUMDes, hasil kekayaan desa melalui potensi yang dimiliki, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan uang, hasil gotong royong masyarakat dan pendapatan asli desa lainnya yang sah.

Tabel 9. Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Tingkat Status Perkembangan Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Tahun 2022

Status Perkembangan Desa	Jumlah Desa	Pendapatan Asli Desa	Rata-rata
Desa Sangat Tertinggal	23	0	0
Desa Tertinggal	25	609.550.278	24.382.011
Desa Berkembang	429	19.747.122.600	46.030.589
Desa Maju	316	14.731.996.688	46.620.243
Desa Mandiri	81	8.784.960.721	108.456.305
Kruskal-Wallis			70.467
Df			4
Asymp. Sig.			.000

Sumber: idm.kemendesa.go.id, 2022 (diolah)

Semakin tinggi tingkat status perkembangan desa, maka pendapatan asli desa yang dihasilkan semakin banyak. Pendapatan asli desa merupakan kemampuan desa menghasilkan pendapatan dari potensi asli desa. Semakin banyak pendapatan asli desa yang diperoleh, maka semakin besar sumber daya keuangan suatu desa dan semakin berkurang ketergantungan terhadap dana transfer. Dengan demikian, pengoptimalan sumber pendapatan asli desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat mendorong kemandirian desa (Iftitah, 2022).

Berdasarkan Tabel 9, dari 23 desa sangat tertinggal, rata-rata masih belum memiliki pendapatan asli desa atau PADes sebesar 0 rupiah. Pada desa tertinggal yang berjumlah 25 desa rata-rata memiliki pendapatan asli desa sebesar 24.382.011 rupiah. Desa berkembang yang berjumlah 429 desa rata-rata memiliki pendapatan asli desa sebesar 46.030.589 rupiah. Desa maju yang berjumlah 316 desa rata-rata memiliki pendapatan asli desa sebesar 46.620.243 rupiah. Desa mandiri yang berjumlah 81 desa rata-rata memiliki pendapatan asli desa sebesar 108.456.305 rupiah. Pendapatan asli desa yang tidak ada atau sedikit dapat terjadi karena sumberdaya yang dimiliki desa berbeda-beda, serta pengelolaan sumber potensi desa yang kurang optimal. Selain itu, desa yang tidak memiliki PADes dapat disebabkan karena hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset, hasil swadaya

dan partisipasi masyarakat serta hasil gotong royong masyarakat yang besarnya dialihkan pada kegiatan atau sumber pendapatan lain sehingga tidak masuk kedalam PADes (Ambarwati, 2021).

Secara statistik, berdasarkan uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan asli desa pada setiap tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022. Desa mandiri memiliki pendapatan asli desa lebih besar dibandingkan status desa lainnya, yaitu rata-rata sebesar 108.456.305 rupiah. Nilai Kruskal-Wallis pendapatan asli desa adalah 70.467, nilai *df* (*degree of freedom*) pendapatan asli desa adalah 4 dan nilai *Asymp. Sig.* Atau nilai *p value* pendapatan asli desa adalah 0.000. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan asli desa pada setiap tingkat status desa.

10. Perbedaan Rata-rata Dana Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Dana desa adalah sumber dana desa sebanyak 10% yang berasal dari anggaran dan belanja negara (APBN) yang kemudian disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Tetapi jumlah nominal dana desa yang diperoleh setiap desa berbeda-beda. Alokasi APBN sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa.

Tabel 10. Dana Desa Berdasarkan Tingkat Status Perkembangan Desa di Wilayah Daratan Provinsi Riau Tahun 2022

Status Perkembangan Desa	Jumlah Desa	Dana Desa	Rata-rata
Desa Sangat Tertinggal	23	3.725.485.600	161.977.635
Desa Tertinggal	25	14.355.754.318	574.230.173
Desa Berkembang	432	472.098.932.578	1.092.821.603
Desa Maju	316	1.151.404.228.606	3.643.684.268
Desa Mandiri	81	74.991.133.178	925.816.459
Kruskal-Wallis			25.729
Df			4
Asymp. Sig.			.000

Sumber: idm.kemendesa.go.id, 2022 (diolah)

Semakin tinggi tingkat status perkembangan desa, maka dana desa yang diperoleh semakin banyak. Program pembangunan desa dilaksanakan guna mengembangkan desa berdasarkan kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya. Untuk meningkatkan perekonomian pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan di daerah-daerah tersebut harus dilanjutkan atau ditingkatkan. Dana desa yang diperoleh setiap desa berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh jumlah desa, jumlah penduduk, luas desa, tingkat kemiskinan desa, dan kesulitan geografis desa (Yulitasari, 2020). Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan dana desa dari pemerintah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga ke depannya desa-desa yang ada menjadi desa yang mandiri.

Berdasarkan Tabel 10, dari 23 desa sangat tertinggal, rata-rata dana desa yang diperoleh sebesar 161.977.635 rupiah. Pada desa tertinggal yang berjumlah 25 desa rata-rata memperoleh dana desa sebesar 574.230.173 rupiah. Desa berkembang yang berjumlah 432 desa rata-rata memperoleh dana desa sebesar 1.092.821.603 rupiah. Pada desa maju yang berjumlah 316 desa rata-rata memperoleh dana desa sebesar 3.643.684.268 rupiah. Desa mandiri yang berjumlah 81 desa rata-rata memperoleh dana desa sebesar 925.816.459 rupiah.

Secara statistik, berdasarkan uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap dana desa pada setiap tingkat status perkembangan desa di wilayah daratan Provinsi Riau tahun 2022. Desa maju memiliki dana desa lebih besar dibandingkan status desa lainnya, yaitu rata-rata sebesar 3.643.684.268 rupiah. Nilai Kruskal-Wallis dana desa adalah 25.729, nilai *df* (*degree of freedom*) dana desa adalah 4 dan nilai *Asymp. Sig.* Atau nilai *p value* dana desa adalah 0.000. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap dana desa pada setiap tingkat status perkembangan desa.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap karakteristik ekonomi desa pada seluruh tingkat status perkembangan desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 di wilayah daratan Provinsi Riau. Desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri memiliki perekonomian lebih baik dibandingkan dengan status desa lainnya. Desa mandiri dikarakteristikan dengan perekonomian yang lebih baik pada industri mikro dan kecil, ketersediaan pertokoan, akses pasar, akses lembaga keuangan/perbankan, keaktifan BUMDes, omset BUMDes, bidang usaha BUMDes, dan pendapatan asli BUMDes. Desa maju dikarakteristikan dengan perekonomian yang lebih baik pada dana desa, dan desa berkembang dikarakteristikan dengan perekonomian yang lebih baik pada produk unggulan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimah, B. S. (2018). *Analisis Kredit Macet Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Di Kecamatan Bareng* (Doctoral dissertation, STIE PGRI DEWANTARA).
- Ambarwati, K., Nikmatullah, D., & Listiana, I. (2021). Dana Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pesawaran. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 326-338.
- Ansari, B., Mirdamadi, S. M., Zand, A., & Arfae, M. (2013). Sustainable entrepreneurship in rural areas. *Research Journal of Environmental and Earth Sciences*, 5(1), 26-31.
- Ariestiyanti, D., & Adrison, V. (2020). Revitalisasi pasar dan stabilisasi harga komoditas pangan. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 14(2), 261-282.
- Elfaki, K. E., Handoyo, R. D., & Ibrahim, K. H. (2021). The impact of industrialization, trade openness, financial development, and energy consumption on economic growth in Indonesia. *Economies*, 9(4), 174.
- Ghozali, M. (2018). Analisis sistem lembaga keuangan syariah Dan lembaga keuangan konvensional. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14(1), 19-21.
- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju. *GROWTH jurnal ilmiah ekonomi pembangunan*, 1(2), 157-172.
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun di kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17-36.
- Jaryono, J., & Tohir, T. (2019, October). Analisis Kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. In *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage* (Vol. 9, No. 1).
- Kalsum, E., & Purnomo, Y. (2019). Pola Pertumbuhan Pasar Rakyat Di Kota Pontianak. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 6(2), 136-153.
- Kasila, M., & Kolopaking, L. M. (2018). Partisipasi pemuda desa dalam perkembangan usaha Bumdes “Tirta Mandiri”. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 43-58.
- Margayaningsih, D. I. (2015). Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa dalam Rangka Otonomi Daerah. *Jurnal Publiciana*, 8 (1), 164–191.
- Muharam, R. Y., & Haviz, M. (2022). Strategi Peningkatan Status Desa dari Tertinggal menjadi Desa Berkembang. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 125-132.
- Ramadana CB, Ribawanto H, Suwondo. 2014. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *JAP*. 1(6):1068-1076.
- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, pp. 606-613).
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52.

- Wahid, M. A. K., Nurhaeni, I. D. A., & Suharto, D. G. (2020, May). The Synergy among Stakeholders in Management of Village-Owned Enterprises (BUM Desa). In *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)* (pp. 317-320). Atlantis Press.
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana desa dan status desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 4(2), 74-83.